



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa dengan adanya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 232 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/Kpu/Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 14/PK.01/1373/2022 tanggal 30 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimaksud diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto bertanggungjawab kepada :

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mata Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 22/HK.03.1/1373/2021 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
Pada tanggal 30 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Rusnel

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 9 TAHUN 2022

TENTANG : STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SAWAHLUNTO

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM STRUKTUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Fadhlan Armeiy, S.Kom	Ketua KPU dan Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pembina PPID
2.	Akhaswita, SH	Divisi Hukum dan Pengawasan	
3.	Desy Fardila, S.Pd, M. Pd	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
4.	Jasmadi, S.IP	Divisi Teknis Penyelenggara	
5.	Rika Arnelia, SH	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
6.	Desy Fardila, S.Pd. M. Pd	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7.	Juni Lesmita Devi, SE	Sekretaris	
8.	Rike Suci Kardia, SH.MH	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
9.	Juni Lesmita Devi, SE	Sekretaris	Atasan PPID
10.	Rike Suci Kardia, SH.MH	Kepala Subbagian Teknis	PPID

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM STRUKTUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
11.	Rusnel, SH	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung Penyedia
12.	Puti Astri P., SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Informasi dan Dokumentasi
13.	Hayatul Mardiah,SH	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
14.	Gustamar, S.Sos	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	Sumarni, S.Sos	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
16.	Nila Irawati Putri, SH	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
17.	Puji Restu Anugerah Ananda, SH	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
18.	Ade Rahmat Kurnia Sari, S.IP	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
19.	Gemilang Nirmala, S.IP	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
20.	Ficky Zulfiqar, SH	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
21.	Anugrah Krisnovandi, S.IP	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
22.	Muhhammad	Pelaksana Subbagian	

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM STRUKTUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Fahrezal Maulana, SH	Hukum dan Sumber Daya Manusia	
23.	Wiska Novita	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Ditetapkan di Sawahlunto  
Pada tanggal 30 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Rusnel

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 9 TAHUN 2022

TENTANG : STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SAWAHLUNTO

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

- A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses informasi publik pada KPU Kota Sawahlunto;
  2. Melakukan pembinaan kepada PPID KPU Kota Sawahlunto.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang :  
Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik pada KPU Kota Sawahlunto.
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses informasi publik pada KPU Kota Sawahlunto;
  2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada KPU Kota Sawahlunto;
  3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penganggungjawab akses Informasi Publik pada KPU Kota Sawahlunto;
  4. Memastikan manajemen pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada KPU Sawahlunto telah sesuai dengan Perundang-Undangan;
  5. Bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- D. PPID Bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada sekretariat KPU Kota Sawahlunto;
  2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Sub bagian pada Sekretariat KPU Sawahlunto;

3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari Sekretariat KPU Kota Sawahlunto;
4. Menyeleksi Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Sub Bagian Hukum dan SDM;
6. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
7. Bertanggungjawab kepada atasan PPID;

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik ;
2. Mengumpulkan, mengolah data dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing –masing sub bagian;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum dan SDM;
4. Bertanggungjawab kepada PPID.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melakukan koordinasi dengan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
2. Memberikan pelayanan teknis;
3. Berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
4. Bertanggungjawab kepada PPID.

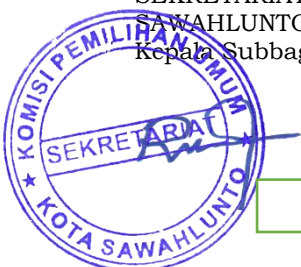
Ditetapkan di Sawahlunto  
Pada tanggal 30 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SAWAHLUNTO  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Rusnel